



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

ANALISIS RISIKO PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP

I. Identitas Wajib Pajak dalam satu grup yang diteliti (2)

No	Nama	NPWP	Alamat	KPP
1.	PT A			
2.	PT B			
3.	PT C			
dst.				

II. Rasio CTTOR 3 tahun terakhir

No (3)	Nama (4)	NPWP (5)	Peredaran usaha (6)	Penghasilan Kena Pajak (7)	PPh Terutang (8)	PPh disetor (9)	% (CTTOR) (10)
Jumlah							

III. Pohon Kepemilikan Perusahaan Grup (11)

IV. Skema Transaksi Afiliasi (12)

V. Analisis risiko atas transaksi afiliasi perusahaan grup (13)

Data transaksi afiliasi PT A

No	Jenis Transaksi Afiliasi	Nilai transaksi afiliasi		
		20xx	20xx	20xx
1.	Penjualan			
2.	Pembelian			
3.	Pembayaran royalti			
4.	Pembayaran atas jasa (<i>intragroup services</i>)			
5.			
	Total transaksi afiliasi			
	Peredaran Usaha			
	Rasio Transaksi Afiliasi terhadap Peredaran Usaha			

Data transaksi afiliasi PT B

No	Jenis Transaksi Afiliasi	Nilai transaksi afiliasi		
		20xx	20xx	20xx
1	Penjualan			
2.	Pembelian			
3.	Pembayaran royalti			
4.	Pembayaran atas jasa (<i>intragroup services</i>)			
5.			
	Total transaksi afiliasi			
	Peredaran Usaha			
	Rasio Transaksi Afiliasi terhadap Peredaran Usaha			

dan seterusnya

VI. Data / Informasi Lain (14)

--

VII. Usulan

Berdasarkan uraian analisis risiko sebagaimana tersebut di atas, maka diusulkan Pemeriksaan Perusahaan grup terhadap Wajib Pajak:

No (15)	Nama (16)	NPWP (17)	Alamat (18)	KPP (19)
1.	PT A			
2.	PT B			
3.	PT C			
dst.				

Mengetahui
Kepala Seksi (22)

....., (20)
Yang Membuat Analisis Risiko

..... (23)
NIP

..... (21)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
ANALISIS RISIKO PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat
- Angka (2) : Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang dilakukan analisis
- Angka (3) : Cukup jelas
- Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka (6) : Diisi dengan peredaran usaha Wajib Pajak
- Angka (7) : Diisi dengan penghasilan kena pajak Wajib Pajak
- Angka (8) : Diisi dengan jumlah pajak terutang Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah pajak yang dibayar/disetor Wajib Pajak
(misalnya kredit pajak ditambah pajak dibayar sendiri dan Pajak Penghasilan 29)
- Angka (10) : Diisi dengan nilai persentase CTTOR (*Corporate Tax Turn Over Ratio*) yaitu persentase pajak terutang terhadap peredaran usaha.
- Angka (11) : Diisi dengan skema pohon kepemilikan perusahaan grup
- Angka (12) : Diisi dengan skema transaksi afiliasi terhadap setiap Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa sesuai pasal 18 ayat (4) UU PPh.
- Angka (13) : Diisi dengan analisis risiko transaksi afiliasi terhadap setiap Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa sesuai pasal 18 ayat (4) UU PPh.
- Angka (14) : Diisi dengan data atau informasi lain yang berguna
- Angka (15) : Cukup jelas.
- Angka (16) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa.
- Angka (17) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa.
- Angka (18) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa.
- Angka (19) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (20) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan analisis risiko.
- Angka (21) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pembuat analisis risiko.
- Angka (22) : Diisi dengan jabatan atasan langsung pembuat analisis risiko.
- Angka (23) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan atasan langsung pembuat analisis risiko.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

Nomor : (2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Pembahasan
Pemeriksaan Perusahaan Grup

Yth. Kepala KPP(4)

Sehubungan dengan pembahasan pemeriksaan perusahaan grup terhadap Wajib Pajak-Wajib Pajak yang tergabung dalam satu grup di bawah ini:

No (5)	Nama (6)	NPWP (7)	Alamat (8)	KPP (9)

maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk menugaskan(10) untuk menghadiri rapat pembahasan hal tersebut di atas pada:

hari/Tanggal :
pukul :
tempat :
bahan yang dibawa : - SPT Tahunan PPh Badan Tahun 20xx, 20xx, 20xx
- Profil Wajib Pajak (*soft copy*)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... (11)

..... (12)
NIP

Tembusan:

1.
2.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT UNDANGAN PEMBAHASAN
PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka (4) : Diisi dengan nama KPP yang dituju.
- Angka (5) : Cukup jelas.
- Angka (6) : Diisi dengan Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (10) : Diisi dengan pihak yang diundang rapat.
- Angka (11) : Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
- Angka (12) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

Nomor : (2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Data Tentang Perusahaan Grup

Yth.(4)

Bersama ini kami sampaikan data tentang Wajib Pajak yang terdaftar di kantor kami dengan disertai data Wajib Pajak yang tergabung dalam satu grup:

No (5)	Nama (6)	NPWP (7)	Alamat (8)	KPP (9)	Kanwil (10)	Keterangan (11)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala (12)

..... (13)
NIP

Tembusan: (14)

1.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT DATA TENTANG PERUSAHAAN GRUP

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka (4) : Diisi dengan Kepala Kanwil DJP yang dituju atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- Angka (5) : Cukup jelas
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (10) : Diisi dengan Kanwil atasan KPP.
- Angka (11) : Diisi dengan data dan informasi yang dianggap perlu.
- Angka (12) : Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
- Angka (13) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
- Angka (14) : Diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan apabila surat ditujukan kepada Kepala Kanwil atau diisi dengan Kepala Kanwil atasan apabila surat ditujukan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

**RISALAH RAPAT PEMBAHASAN
 PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP**

I. Daftar Wajib Pajak:

No (2)	Nama Wajib Pajak (3)	NPWP (4)	KPP (5)	Peredaran Usaha (6)	CTTOR (%) (7)
Total					

II. Pendapat-pendapat peserta rapat

1. KPP(8)
 Pendapat:

2. KPP(8)
 Pendapat:

3. dst.

III. Kesimpulan: (9)

1.
 2.
- dst.

KPP

KPP

KPP

..... (10)

..... (10)

..... (10)

Mengetahui,
 Kepala (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH RAPAT PEMBAHASAN
Pemeriksaan Perusahaan Grup

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat
- Angka (2) : Cukup jelas
- Angka (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP
- Angka (5) : Diisi dengan nama KPP
- Angka (6) : Diisi dengan peredaran usaha
- Angka (7) : Diisi dengan persentase CTTOR
- Angka (8) : Diisi dengan nama KPP dan pendapat
- Angka (9) : Diisi dengan kesimpulan rapat
- Angka (10) : Diisi dengan nama, NIP, Jabatan yang mewakili KPP terkait
- Angka (11) : Diisi dengan Jabatan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Subdirektorat yang memimpin rapat
- Angka (12) : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Subdirektorat yang memimpin rapat



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

**BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN
Pemeriksaan Perusahaan Grup**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6), telah dilaksanakan rapat pembahasan pemeriksaan perusahaan grup oleh (7) bersama dengan pihak-pihak terkait terhadap:

No (8)	Nama Wajib Pajak (9)	NPWP (10)	Alamat (11)	KPP (12)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

KPP

KPP

KPP

..... (13)

..... (13)

..... (13)

Mengetahui,
Kepala (14)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN
Pemeriksaan Perusahaan Grup

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat instansi yang mengundang rapat
- Angka (2) : Diisi dengan hari dilaksanakannya rapat pembahasan pemeriksaan perusahaan grup
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal dilaksanakannya rapat pembahasan pemeriksaan perusahaan grup
- Angka (4) : Diisi dengan bulan dilaksanakannya rapat pembahasan pemeriksaan perusahaan grup
- Angka (5) : Diisi dengan tahun dilaksanakannya rapat pembahasan pemeriksaan perusahaan grup
- Angka (6) : Diisi dengan tempat dilaksanakannya rapat pembahasan pemeriksaan perusahaan grup
- Angka (7) : Diisi dengan nama pihak yang menyelenggarakan rapat (Kanwil DJP atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan) pembahasan pemeriksaan perusahaan grup
- Angka (8) : Cukup jelas
- Angka (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pembahasan pemeriksaan perusahaan grup
- Angka (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan pembahasan pemeriksaan perusahaan grup
- Angka (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan pembahasan pemeriksaan perusahaan grup
- Angka (12) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP yang mewakili KPP terkait
- Angka (14) : Diisi dengan Jabatan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Subdirektorat yang memimpin rapat.
- Angka (15) : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Subdirektorat yang memimpin rapat.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus

Yth.
..... (4)

Sehubungan dengan (5), dengan ini diinstruksikan kepada Saudara untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Kode Pemeriksaan : (9)

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa dan/atau Tahun Pajak yang diperiksa adalah (10)
2. Pemeriksaan harus diselesaikan selambat-lambatnya (11)
3. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib pajak dan pembahasan akhir dapat dilakukan (12)
surat tindak lanjut hasil pemeriksaan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
4. (13)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

..... (14)

..... (15)
NIP

Tembusan:
..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT INTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat instruksi Pemeriksaan Khusus.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat instruksi Pemeriksaan Khusus.
- Angka (4) : Diisi dengan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Khusus.
- Angka (5) : Diisi dengan alasan diterbitkannya instruksi Pemeriksaan Khusus.
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (9) : Diisi dengan kode pemeriksaan.
- Angka (10) : Diisi dengan masa dan/atau Tahun Pajak yang diperiksa.
- Angka (11) : Diisi dengan batas waktu penyelesaian pemeriksaan.
(contoh: Pemeriksaan harus diselesaikan selambat-lambatnya 6 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan).
- Angka (12) : Diisi dengan:
- a. **setelah ada**, dalam hal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir dapat dilakukan setelah ada surat tidak lanjut hasil pemeriksaan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - b. **tanpa menunggu**, dalam hal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir dapat dilakukan tanpa menunggu surat tidak lanjut hasil pemeriksaan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- Angka (13) : Diisi dengan ketentuan lain yang diperlukan.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
- Angka (15) : Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.
- Angka (16) : Diisi dengan Direktur pemeriksaan dan Penagihan apabila instruksi diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP atau Kepala Kantor Wilayah DJP atasan UP2 yang ditunjuk apabila instruksi diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

**RISALAH RAPAT KOORDINASI AWAL
 PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP**

I. Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus:

1. PT A

No	Pos Laporan Keuangan	Nilai	% Transaksi Grup	Nama Wajib Pajak dan NPWP Lawan Transaksi	KPP
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peredaran Usaha				
2.	dst				

2. PT B

II. Pembahasan

1. KPP(8)

.....

2. KPP(8)

.....

III. Lain-lain (9)

.....

KPP

KPP

KPP

..... (10)

..... (10)

..... (10)

Mengetahui,
 Kepala

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH RAPAT KOORDINASI AWAL
PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Cukup jelas.
- Angka (3) : Diisi dengan pos-pos laporan keuangan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus.
- Angka (4) : Diisi dengan nilai transaksi.
- Angka (5) : Diisi dengan persentase dari nilai transaksi grup.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksi.
- Angka (7) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (8) : Diisi dengan nama KPP yang memberikan pendapat dalam rapat beserta pendapatnya.
- Angka (9) : Diisi dengan keterangan lainnya.
- Angka (10) : Diisi dengan nama, NIP dan jabatan yang mewakili KPP dalam menghadiri rapat koordinasi awal pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (11) : Diisi dengan jabatan, nama, dan NIP Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Subdirektorat yang memimpin rapat.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI AWAL
Pemeriksaan Perusahaan Grup**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6), telah dilaksanakan rapat koordinasi awal pemeriksaan perusahaan grup oleh (7) bersama dengan pihak-pihak terkait terhadap:

No (8)	Nama Wajib Pajak (9)	NPWP (10)	Alamat (11)	KPP (12)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

KPP

KPP

KPP

..... (13)

..... (13)

..... (13)

Mengetahui,
Kepala

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI AWAL
Pemeriksaan Perusahaan Grup

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan hari dilaksanakannya rapat koordinasi awal pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal dilaksanakannya rapat koordinasi awal pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (4) : Diisi dengan bulan dilaksanakannya rapat koordinasi awal pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (5) : Diisi dengan tahun dilaksanakannya rapat koordinasi awal pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (6) : Diisi dengan tempat dilaksanakannya rapat koordinasi awal pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Kanwil DJP atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang mengundang rapat koordinasi awal pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (8) : Cukup jelas.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan grup.
- Angka (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan grup.
- Angka (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan grup.
- Angka (12) : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (13) : Diisi dengan nama, NIP dan jabatan yang mewakili KPP dalam menghadiri rapat koordinasi awal pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP yang memimpin rapat atau Kepala Subdirektorat pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang memimpin rapat.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

**RISALAH RAPAT KOORDINASI
 PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP**

I. Daftar Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus:

1. PT A

No	Pos Laporan Keuangan	Nilai	% Transaksi Grup	Nama Wajib Pajak dan NPWP Lawan Transaksi	KPP
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peredaran Usaha				
2.	dst				

2. PT B

II. Pembahasan

1. KPP(8)
 Pendapat:

.....

2. KPP(8)
 Pendapat:

.....

3. dst.

III. Kesimpulan : (9)

1.
2.

KPP

KPP

KPP

..... (10)

..... (10)

..... (10)

Mengetahui,
 Kepala

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH RAPAT KOORDINASI
PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Cukup jelas.
- Angka (3) : Diisi dengan pos-pos dalam laporan keuangan atas Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus.
- Angka (4) : Diisi dengan nilai transaksi.
- Angka (5) : Diisi dengan persentase dari nilai transaksi grup.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksi.
- Angka (7) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (8) : Diisi dengan nama KPP yang memberikan pendapat dalam rapat beserta uraian pendapatnya.
- Angka (9) : Diisi dengan kesimpulan rapat.
- Angka (10) : Diisi dengan nama, NIP dan jabatan yang mewakili KPP dalam menghadiri rapat koordinasi pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (11) : Diisi dengan jabatan, nama, dan NIP Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Subdirektorat yang memimpin rapat.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
Pemeriksaan Perusahaan Grup**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6), telah dilaksanakan rapat koordinasi pemeriksaan perusahaan grup oleh (7) bersama dengan pihak-pihak terkait terhadap:

No (8)	Nama Wajib Pajak (9)	NPWP (10)	Alamat (11)	KPP (12)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

KPP

KPP

KPP

..... (13)

..... (13)

..... (13)

Mengetahui,
Kepala

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
Pemeriksaan Perusahaan Grup

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan hari dilaksanakannya rapat koordinasi pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal dilaksanakannya rapat koordinasi pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (4) : Diisi dengan bulan dilaksanakannya rapat koordinasi pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (5) : Diisi dengan tahun dilaksanakannya rapat koordinasi pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (6) : Diisi dengan tempat dilaksanakannya rapat koordinasi pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Kanwil DJP atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang mengundang rapat koordinasi pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (8) : Cukup jelas.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (12) : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (13) : Diisi dengan nama, NIP dan jabatan yang mewakili KPP dalam menghadiri rapat koordinasi pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak dari Kanwil atau Kepala Subdirektorat yang memimpin rapat.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

**RISALAH RAPAT KOORDINASI AKHIR
 PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP**

I. Daftar Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus:

1. PT A

No	Pos Laporan Keuangan	Nilai	% Transaksi Grup	Nama Wajib Pajak dan NPWP Lawan Transaksi	KPP
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peredaran Usaha				
2.	dst				

2. PT B

II. Pembahasan

1. KPP(8)

Pos-pos yang dikoreksi :

.....

.....

2. KPP(8)

Pos-pos yang dikoreksi :

.....

.....

III. Lain-lain : (9)

.....

.....

KPP

KPP

KPP

..... (10)

..... (10)

..... (10)

Mengetahui,
 Kepala

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH RAPAT KOORDINASI AKHIR
PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Cukup jelas.
- Angka (3) : Diisi dengan pos-pos dalam laporan keuangan
- Angka (4) : Diisi dengan nilai transaksi.
- Angka (5) : Diisi dengan persentase transaksi perusahaan grup.
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dan NPWP lawan transaksi.
- Angka (7) : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (8) : Diisi dengan nama KPP yang memberikan penjelasan dan uraian atas pos yang dikoreksi.
- Angka (9) : Diisi dengan keterangan lain.
- Angka (10) : Diisi dengan nama, NIP dan jabatan yang mewakili KPP dalam menghadiri rapat koordinasi akhir pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (11) : Diisi dengan jabatan, nama, dan NIP Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak atau Kepala Subdirektorat yang memimpin rapat.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI AKHIR
Pemeriksaan Perusahaan Grup**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6), telah dilaksanakan rapat koordinasi akhir pemeriksaan perusahaan grup oleh (7) bersama dengan pihak-pihak terkait terhadap:

No (8)	Nama Wajib Pajak (9)	NPWP (10)	Alamat (11)	KPP (12)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

KPP

KPP

KPP

..... (13)

..... (13)

..... (13)

Mengetahui,
Kepala

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI AKHIR
Pemeriksaan Perusahaan Grup

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan hari dilaksanakannya rapat koordinasi akhir pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal dilaksanakannya rapat koordinasi akhir pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (4) : Diisi dengan bulan dilaksanakannya rapat koordinasi akhir pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (5) : Diisi dengan tahun dilaksanakannya rapat koordinasi akhir pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (6) : Diisi dengan tempat dilaksanakannya rapat koordinasi akhir pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Kanwil/Subdirektorat yang mengundang rapat koordinasi akhir pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (8) : Cukup jelas.
- Angka (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (12) : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP yang mewakili KPP dalam menghadiri rapat koordinasi akhir pemeriksaan perusahaan grup.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak dari Kanwil DJP atau Kepala Subdirektorat yang memimpin rapat.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

Nomor : (2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Grup

Yth.(4)

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan perusahaan grup atas Wajib Pajak yang terdaftar di kantor kami sebagai berikut:

No (5)	Nama (6)	NPWP (7)	Nomor SKP (8)	KPP (9)	Keterangan (10)

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala (11)

..... (12)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT DATA TENTANG PERUSAHAAN GRUP

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Angka (4) : Diisi dengan Kepala Kanwil DJP atasan untuk laporan KPP atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka (5) : Cukup jelas
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan nomor SKP yang diterbitkan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (10) : Diisi dengan data dan informasi yang dianggap perlu.
- Angka (11) : Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
- Angka (12) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.